

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI SUMATERA SELATAN 2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI SUMATERA SELATAN 2020



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER PROVINSI SUMATERA SELATAN 2020

ISBN	: 978-602-6925-54-1
Katalog	: 3102017.16
Nomor Publikasi	: 16000.2111
Ukuran Buku	: 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman	: xii + 69 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Gambar Kulit	: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Diterbitkan oleh	: ©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Dicetak oleh	: CV.Pensil Kreasi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah : Ir. Zulkipli, M.Si

Koordinator : Tri Ratna Dewi, S.Si, MM

Penyusun : Desi Eryani, S.ST, M.Si

Rini Tri Hadiyati, SST, M.Si

Penyunting : Tri Ratna Dewi, S.Si, MM

Dana Megayani, S.ST, M.Si

Tata Letak : Desi Eryani, S.ST, M.Si

Gambar Kulit : Desi Eryani, S.ST, M.Si

www.freepik.com

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Selatan 2020 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Publikasi ini disajikan dalam bentuk analisis yang memuat hasil atau capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender di Sumatera Selatan, yang mencakup aspek pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Publikasi ini disajikan menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan publikasi ini untuk mengetahui peta pembangunan manusia berbasis gender. Selain itu dapat juga dilihat komponen capaian pembangunan manusia menurut jenis kelamin.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat terwujud. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Palembang, Juli 2021
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. Zulkipli, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Sistematika Penulisan	6
1.4 Sumber Data	6
BAB II METEDOLOGI	7
II.1 Bagaimana Metode Baru	9
II.2 Penyusunan Indeks Komposit	12
II.3 Perubahan Interpretasi	14
BAB III GAMBARAN UMUM GENDER SUMATERA SELATAN	15
III.1 Komposisi Penduduk	19
III.2 Kesehatan	22
III.3 Pendidikan	26
III.4 Ketenagakerjaan	31
III.5 Kesempatan dalam Pemerintahan	35

	Halaman	
BAB IV	CAPAIAN PEMBANGUNAN GENDER SUMATERA SELATAN	37
	IV.1 PG Provinsi di Pulau Sumatera	42
	IV.2 IPG Sumatera Selatan	43
	IV.3 Komponen IPG Sumatera Selatan	45
	IV.4 Pencapaian Komponen IDG Sumatera Selatan	51
	IV.4.1 Keterwakilan Perempuan di Parlemen	52
	IV.4.2 Tenaga Manger, Profesional, Administrator, dan Teknisi	54
	IV.5 Disparitas Capaian IPG Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	55
	IV.6 Hubungan antara IPM dan IPG	58
BAB V	KESIMPULAN	63
	LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG	12
Tabel 3.1 TPAK Penduduk Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2020 (Persen)	22
Tabel 4.1 Rasio dan Nilai Komponen IPG Sumatera Selatan, 2020	45
Tabel 4.2 IDG dan Komponen IDG Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota , 2020	57

<https://sumsel.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 3.1	Piramida Penduduk Sumatera Selatan, 2020	20
Gambar 3.2	Angka HarapanHidup (AHH) di Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2020	24
Gambar 3.3	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh, Provinsi Sumatera Selatan, 2020	27
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Pendidikan SD, SMP, SMA Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan, 2020	28
Gambar 3.5	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan, Periode 2017-2020	29
Gambar 3.6	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan, Periode 2017-2020	30
Gambar 3.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2020	32
Gambar 3.8	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan, 2020	34
Gambar 3.9	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan, 2020	35

Gambar 4.1	Indeks Pembangunan Gender di Indonesia dan Provinsi di Pulau Sumatera, 2020	42
Gambar 4.2	Perkembangan IPG Sumatera Selatan 2017-2020	44
Gambar 4.3	Pencapaian Komponen IDG di Sumatera Selatan, 2020	51
Gambar 4.4	Indeks Pembangunan Gender di Indonesia dan Provinsi di Pulau Sumatera, Periode 2018-2020	53
Gambar 4.5	Pencapaian IPG Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020	56
Gambar 4.6	Trend IPM dan IPG Sumatera Selatan, 2020	60

BAB I

PENDAHULUAN

<https://www.semanticscholar.org/>

I.1 Pendahuluan

Dari beberapa literatur, konsep gender secara umum diartikan bukan sebagai perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, melainkan perbedaan peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penjabaran konsep gender adalah keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya, peran kaum perempuan juga dapat terlihat dari peran reproduksi, peran produktif, dan peran sosial kemasyarakatan (Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, 1998; Pusat Studi Wanita Universitas Udayana, 2003; Sudarta, 2005).

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, isu-isu terkait gender cukup menarik perhatian terutama pada masalah diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Diskriminasi terjadi dari berbagai aspek kehidupan yaitu berupa perilaku masyarakat yang berasal dari suatu aturan, sejarah, adat, norma, dan struktur masyarakat. Diskriminasi gender akan melahirkan kesenjangan gender, yang akan menghilangkan hak-hak perempuan atas kesempatan dan kendali pada sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik.

Sebagai pihak yang melahirkan dan mendidik generasi penerus, perempuan harus dilindungi hak-hak hidupnya. Bentuk perlindungan hak-hak tersebut adalah menerima perlakuan yang adil terhadap aspek-aspek dasar manusia, yaitu dalam aspek-aspek dasar manusia yaitu dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan yang melahirkan kesetaraan dan keadilan gender menjadi sangat mutlak.

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah dilakukan oleh berbagai pihak. Masyarakat dunia melalui Majelis Umum PBB telah mencetuskan deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang merupakan bentuk keprihatinan dunia terhadap permasalahan gender, dan diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya yang berkaitan mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga mengadopsi berbagai kebijakan yang mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui GBHN, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Saat ini juga sedang dibahas mengenai Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak serta merta masalah-masalah terkait gender akan hilang. Sebagian perempuan masih menjadi obyek yang

harus menderita, seperti pada kasus kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia dan lain-lain. Di samping itu, kesempatan perempuan dalam menyalurkan aspirasinya melalui perlemen juga masih minim. Padahal perempuan telah berperan banyak dalam pembangunan nasional dan pewujudan kesejahteraan. Hal ini seiring dengan pendapat dari UNDP, bahwa mengabaikan aspek gender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah.

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender saat ini telah dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender), yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programs* (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995. Dari angka IPG ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai perkembangan capaian manusia yang sudah mengakomodasi aspek-aspek gender.

1.2 Tujuan

Publikasi ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis gender yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). Disamping itu, disajikan pula analisis mengenai angka IPG pada level provinsi dan kabupaten.

I.3 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

- Bab I : menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, sistematika penulisan, dan sumber data
- Bab II : menjelaskan mengenai metodologi penghitungan IPG
- Bab III : menjelaskan mengenai gambaran umum gender di Sumatera Selatan
- Bab IV : menjelaskan mengenai capaian pembangunan gender di Sumatera Selatan

I.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Survei Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data primer dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) sebagai data sekunder. Data Sensus Penduduk 2010 digunakan untuk menghitung angka harapan hidup. Sedangkan data Susenas sendiri digunakan untuk menghitung angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara data Sakernas digunakan untuk mendapatkan angka upah serta jumlah angkatan kerja sebagai penunjang penghitungan pendapatan per kapita yang disesuaikan.

BAB II

METODOLOGI

<https://sumel.bpt.go.id>

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap jenis kelamin. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dan IPM laki-laki sehingga terlihat pencapaian antara perempuan dan laki-laki.

II.1 Bagaimana Metode Baru?

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama

seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

- umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- pengetahuan (*knowledge*); dan
- standar hidup layak (*decent standard of living*).

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, di mana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk SP2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari Susenas. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak

menggunakan PNB per kapita karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini dilakukan dengan pendekatan dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang diperoleh dari Susenas.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur *output* dari dimensi pengetahuan. Dengan demikian, dimensi ini telah mencakup indikator output dan input.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

II.2 Penyusunan Indeks Komposit

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing-masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan

Tabel 2.1 Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

Indikator	Maksimum		Minimum	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Harapan Hidup (tahun)	82,5	87,5	17,5	22,5
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	18	18	0	0
Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	15	15	0	0
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Rp)	1.007.436		26.572.352	

maksimum untuk masing-masing komponen.

$$Indeks X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-min)})}{(X_{(i-maks)} - X_{(i-min)})}$$

Penyusunan indeks masing-masing indikator, digunakan rumus sebagai berikut

$$X_{pendidikan} = \frac{X_{p1} + X_{p2}}{2}$$

Dimana :

$X(i, j)$: indeks komponen ke-i

$X(i-min)$: nilai minimum komponen

$X(i-maks)$: nilai maksimum komponen

Setelah masing-masing komponen memiliki indeks, dilakukan penghitungan untuk indeks pendidikan. Penghitungan indeks pendidikan menggunakan rata-rata aritmatik yaitu:

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka

$$IPM_L = \sqrt[3]{X_{kesehatan L} \times X_{pendidikan L} \times X_{pengeluaran L}}$$
$$IPM_P = \sqrt[3]{X_{kesehatan P} \times X_{pendidikan P} \times X_{pengeluaran P}}$$

IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut:

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang

terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antar dimensi.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$$

Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

II.3 Perubahan Interpretasi

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai

BAB III
GAMBARAN UMUM
GENDER
SUMATERA SELATAN

Gender secara umum diartikan bukan sebagai perbedaan jenis kelamin, melainkan perbedaan peran, perilaku, kegiatan, serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Gender juga merupakan keselarasan dalam peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan perempuan.

Selama ini peran publik dan domestik menjadi pembeda antara peran laki-laki dan perempuan di masyarakat. Laki-laki cenderung berperan dalam aktivitas publik, yaitu aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan pendapatan. Sedangkan perempuan lebih banyak dalam peran domestik, yaitu aktivitas yang dilakukan di dalam rumah, yaitu mengurus rumah tangga dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pendapatan. Kedua peran tersebut menggambarkan adanya perbedaan peran gender dalam masyarakat selama ini. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini tidak terlepas dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga. Sementara untuk mencari nafkah keluarga menjadi tanggung jawab laki-laki.

Banyak pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan bersifat lemah dan selalu mengedepankan perasaan, berpikiran rumit bahkan sempit, dan sebagainya. Budaya patriarki yang mendominasi berkembang di masyarakat

Indonesia, turut menempatkan posisi perempuan di nomor kedua. Dengan demikian, peran serta atau partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingannya belum terwakili. Hal itulah berdampak pada ketidaksetaraan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Dewasa ini, perempuan Indonesia justru telah bangkit dari pandangan lama dan membuktikan bahwa perempuan telah berdaya dan mampu berupaya dengan cara memberikan sumbangan besar bagi kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat. Terlihat dari banyaknya perempuan yang berkarya dan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Bahkan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung karena suami tidak bekerja atau menjadi orang tua tunggal. Di samping itu, banyak prestasi-prestasi yang diperoleh para perempuan Indonesia pada level nasional maupun internasional. Potensi yang dimiliki oleh perempuan Indonesia tidak kalah dengan kemampuan laki-laki. Semakin banyak kesempatan yang diberikan pada perempuan untuk peran publik, maka akan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Mengingat jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan penduduk laki-laki.

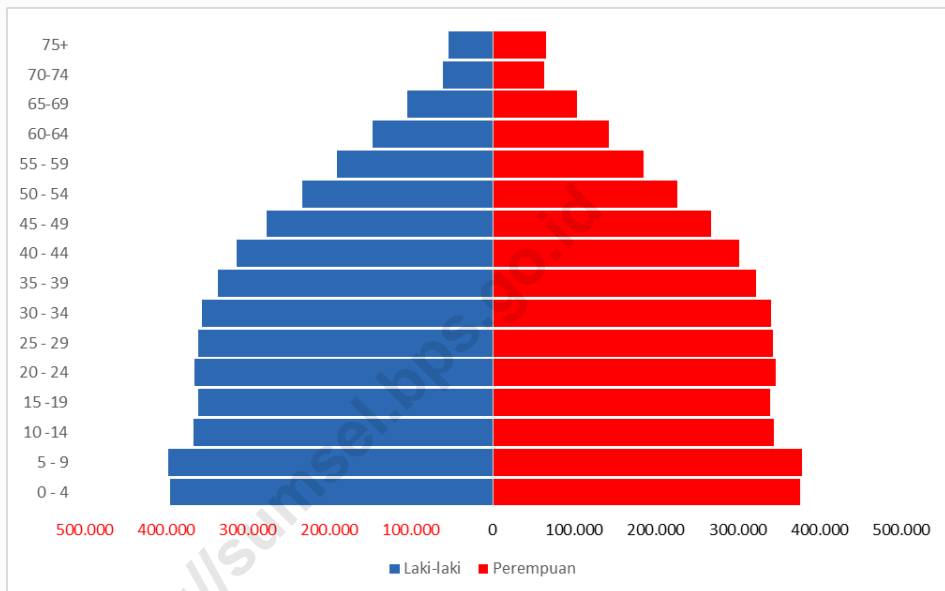
III.1 Komposisi Penduduk

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan yang tidak hanya digunakan sebagai alat pembangunan tapi juga sebagai sasaran dalam pembangunan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Sumatera Selatan diperkirakan lebih dari 8,47 juta jiwa. Dengan *sex ratio* sebesar 104,16 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih sedikit lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan. Komposisi jumlah penduduk laki-laki yang lebih dominan dari perempuan hampir terjadi pada semua kelompok umur, kecuali usia 70 tahun ke atas.

Jika dilihat dari sisi demografi, peran perempuan dapat terlihat dari komposisi umurnya. Perempuan sangat berperan dalam menghasilkan generasi penerus. Hal ini sangat terkait dengan fungsi reproduksinya. Untuk menghasilkan generasi yang unggul dan berkualitas maka kesehatan perempuan dalam proses hamil, melahirkan sampai menyusui perlu dijaga dengan baik. Jaminan kesehatan tidak hanya fungsi reproduksinya tetapi juga fisik serta psikologinya. Fase perempuan pada proses ini tercermin pada masa usia subur yaitu pada kelompok umur 15 – 44 tahun. Tercatat jumlah penduduk perempuan usia subur pada tahun 2020 sekitar 2 juta orang, atau sebesar 49,38 persen terhadap jumlah penduduk perempuan. Besarnya jumlah penduduk perempuan

pada kelompok ini perlu mendapatkan perhatian serius khususnya kesehatan ibu. Karena perannya yang cukup besar untuk melahirkan generasi-generasi penerus yang berkualitas.

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Sumatera Selatan, 2020



Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2020

Dari sisi lain, perempuan mempunyai peran produktif, yaitu peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga. Dari tahun ke tahun, peran perempuan tersebut semakin meningkat. Peran produktif ini dapat diartikan peran publik. Dari komposisi jumlah penduduk menurut umur, peran produktif terepresentatif dari usia produktif, yaitu pada kelompok 15-64 tahun.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk perempuan pada kelompok usia produktif mencapai 2,88 juta atau sekitar 69,39 persen dari penduduk perempuan. Jumlah yang besar ini menunjukkan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan. Dengan demikian, apabila perempuan tidak berperan, tidak ikut berkarya secara produktif maka akan menjadi beban ekonomi bagi bangsa Indonesia.

Jumlah penduduk, usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, serta berbagai sisi budaya, sosial, dan ekonomi maupun demografi merupakan faktor-faktor yang berdampak langsung terhadap tinggi rendahnya TPAK di Sumatera Selatan.

Besarnya proporsi penduduk usia produktif menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2020 menjadi 68,65 persen.

TPAK penduduk perempuan di wilayah Sumatera Selatan lebih rendah dibandingkan TPAK penduduk laki-laki, TPAK penduduk perempuan cenderung lebih rendah secara periodik. Tanggung jawab mencari nafkah masih dianggap menjadi suatu kewajiban penduduk laki-laki. Sudut pandang ini masih menjadi hambatan bagi penduduk perempuan untuk berpartisipasi dalam

dunia kerja.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2020, TPAK laki-laki sebesar 82,71 persen dan TPAK perempuan hanya sebesar 54,25 persen.

Tabel 3.1 TPAK Penduduk Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2020 (Persen)

Daerah Tempat Tinggal	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perdesaan	80,01	51,55	65,63
Perkotaan	84,27	55,94	70,47
Perkotaan+Perdesaan	82,71	54,25	68,65

Sumber: Sakernas Agustus 2020, BPS Provinsi Sumatera Selatan

III.2 Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan yang mencerminkan kualitas dari sumber daya manusia. Untuk memperoleh hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pembangunan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral

dari pembangunan nasional yang bertujuan bagi semua lapisan masyarakat agar memperoleh kesehatan secara mudah, leluasa, dan murah.

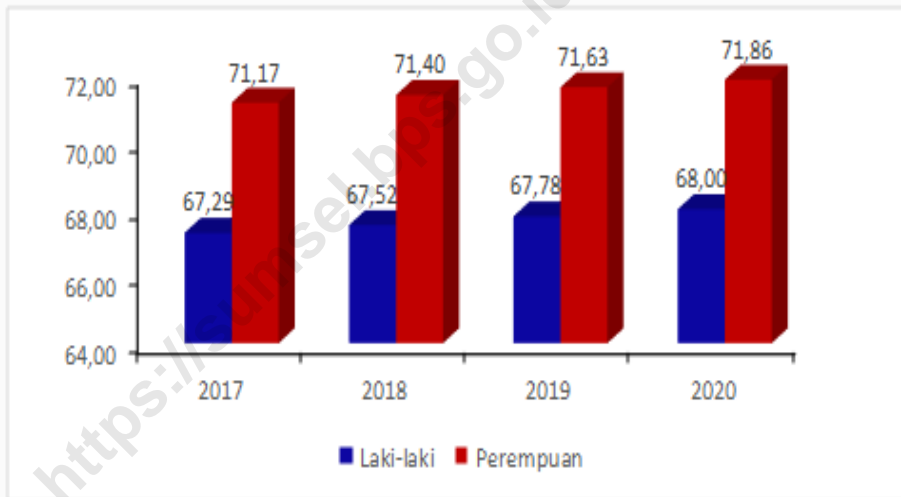
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan selain angka kesakitan dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang dijadikan sebagai tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan kesehatan.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Kata kesehatan dapat dimaknai sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan).

Secara umum tren AHH baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan selalu mengalami peningkatan dari periode 2017 hingga 2020. Hal ini mengindikasikan pembangunan kesehatan di Sumatera Selatan telah

berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Besaran AHH menunjukkan adanya perbedaan level capaian antara AHH perempuan dan laki-laki. Level AHH penduduk laki-laki lebih rendah sekitar 3 hingga 4 tahun dibanding level AHH penduduk perempuan. Selama periode 2017-2020 pergerakan AHH perempuan dan laki-laki cenderung stagnan sehingga gap capaian tidak berubah.

Gambar 3.2 Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2020



Sumber : BPS

Perbedaan level atau gap yang terjadi pada AHH merupakan fenomena yang lazim. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor biologis dan gaya hidup. Laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah

lain di dalam kandungan saat dilahirkan. Selain itu perkembangan secara fisik laki-laki lebih lambat dibandingkan perempuan sebelum lahir. Hal itulah yang menyebabkan laki-laki beresiko meninggal jika lahir premature. Di samping itu, sejak lahir wanita dibekali sepasang kromosom X mengandung sekitar 1.100 gen. Selain berperan penting dalam pengaturan hormon, kromosom X juga dalam fungsi vital tubuh lainnya, mulai dari pembekuan darah, metabolisme dan perkembangan janin. Sedangkan kromosom Y pada laki-laki hanya mempunyai kurang dari 100 gen, dimana fungsi utamanya hanya untuk pembentukan dan perkembangan organ kelamin dan hormonalnya. Oleh karena itu, secara biologis wanita lebih mampu bertahan dibanding laki-laki, terutama pada masa tahun pertama kehidupan.

Faktor biologis lainnya adalah hormon estrogen yang dimiliki perempuan menjadi salah satu pelindung alami dari perkembangan penyakit jantung dan perubahan kondisi tubuh perempuan sepanjang hidupnya. Perubahan kondisi tubuh dari menstruasi, kehamilan, melahirkan, hingga menopause membuat tubuh perempuan secara internal lebih “tahan banting”. Sebaliknya, hormon testosteron yang dimiliki pria cenderung mendorong aktivitas yang lebih beresiko seperti merokok sehingga berpengaruh pada keselamatan hidupnya.

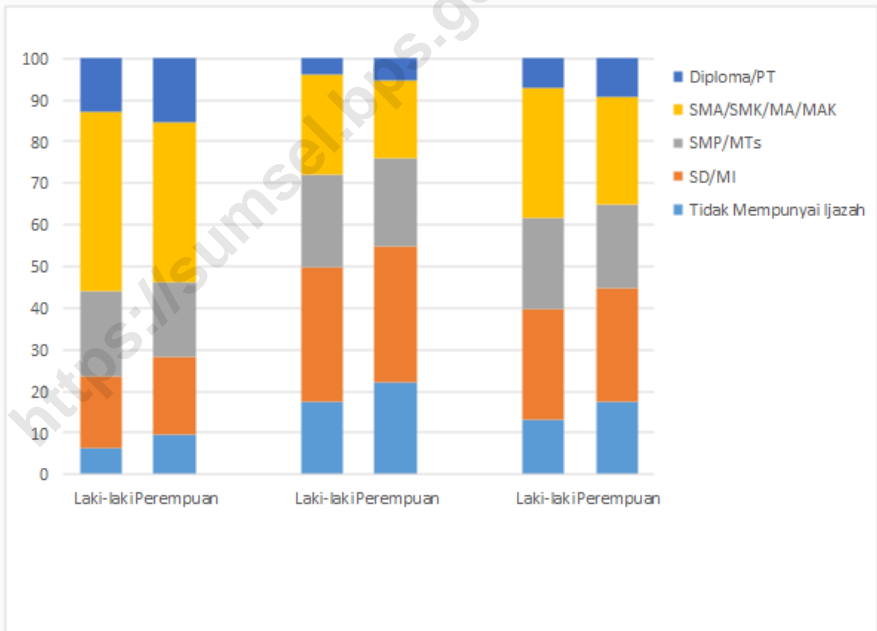
Dilihat dari aspek gaya hidup, secara umum lebih banyak laki-laki yang bekerja dan beraktivitas di luar dibandingkan dengan perempuan. Padatnya aktivitas kerja yang dilakukan tentu berpotensi “mendatangkan” berbagai macam resiko, seperti stress, depresi, lingkungan yang tidak sehat, obesitas hingga penyakit-penyakit menular yang berbahaya. Selain itu pekerjaan yang beresiko seperti supir, pekerja bangunan dan lain-lain lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Akibatnya resiko kecelakaan kerja juga lebih banyak dialami laki-laki dibandingkan perempuan.

III.3 Pendidikan

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Di Sumatera Selatan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai setara. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang. Pada jenjang pendidikan SD dan Perguruan Tinggi, persentase perempuan yang memperoleh ijazah melebihi persentase laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat Sumatera Selatan yang memprioritaskan laki-laki untuk memperoleh pendidikan

lebih tinggi dibandingkan perempuan sudah mulai memudar. Namun, pada jenjang pendidikan sekolah menengah persentase perolehan ijazah laki-laki masih lebih besar dibandingkan perempuan. Demikian pula dengan persentase perempuan yang tidak memiliki ijazah, juga lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

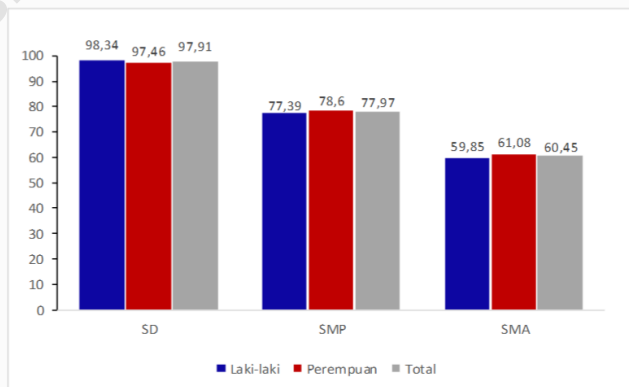
Gambar 3.3 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh Provinsi Sumatera Selatan, 2020



Sumber : Susenas, BPS

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat juga dilihat dari rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki pada tiga jenjang pendidikan (Gambar 3.4). APM adalah proporsi anak sekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Pada tahun 2020, rasio APM pada jenjang SMP dan SMA di atas 100, menunjukkan bahwa secara umum di wilayah Sumatera Selatan (perkotaan dan perdesaan) kesempatan perempuan untuk bersekolah pada jenjang tersebut lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara jenjang pendidikan SD masih didominasi oleh anak laki-laki. Tingginya rasio APM pada jenjang SMP dan SMA merupakan prestasi bagi perempuan Sumatera Selatan dalam mengejar ketertinggalannya dalam aspek pendidikan pada level yang lebih tinggi.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat Pendidikan SD, SMP, dan SMA Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan, 2020

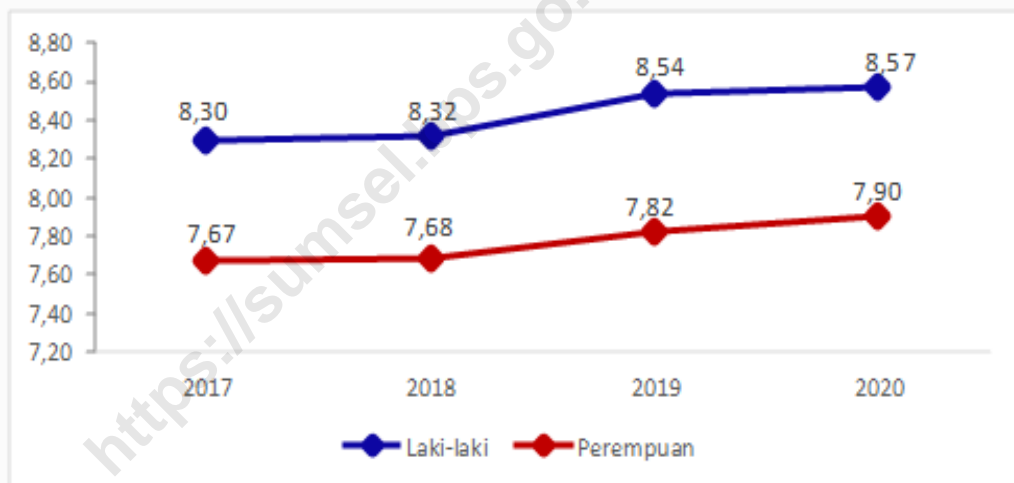


Sumber : BPS

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Selatan

Angka indikator pendidikan lain adalah rata-rata lama sekolah. Selama periode 2020, pola peningkatan angka rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan relatif lebih tinggi (Gambar 3.5). Pada tahun 2020, angka rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 8,57 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP, sedangkan untuk perempuan memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 7,90 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP.

Gambar 3.5 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah
Provinsi Sumatera Selatan,
Periode 2017-2020



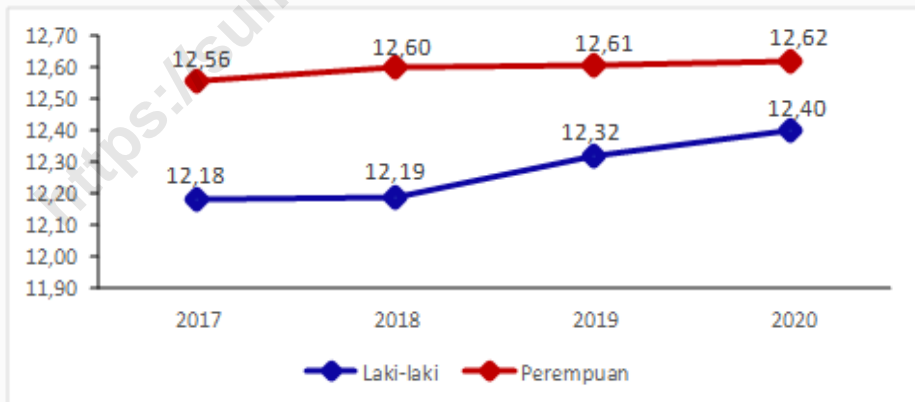
Sumber : BPS

Secara umum, selama periode 2017-2020 perbedaan capaian rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kecenderungan yang mengecil meskipun tidak

terlalu signifikan. Hal ini menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih mengupayakan peningkatan pembangunan pendidikan masyarakat khususnya bagi perempuan.

Meskipun rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dari laki-laki, namun harapan lama sekolah perempuan relatif sama dengan laki-laki. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mengasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Gambar 3.6 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan, Periode 2017-2020



Sumber: BPS

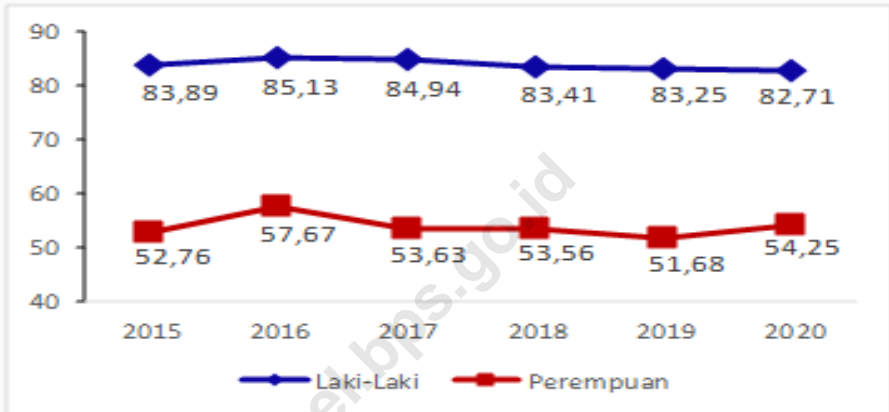
Pada periode 2017-2020 angka HLS terus meningkat untuk tiap tahunnya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2018, angka HLS baik perempuan maupun laki-laki, mengalami peningkatan namun tidak terlalu tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pada tahun 2017-2020 angka HLS perempuan sedikit lebih tinggi dari laki-laki, namun perbedaannya dalam dua tahun terakhir semakin mengecil. Pada tahun 2020 angka HLS laki-laki pada tahun 2020 mencapai 12,40 tahun, relatif sama dengan HLS perempuan yang mencapai 12,62 tahun. Angka HLS tersebut menunjukkan adanya kemauan untuk terwujudnya kesetaraan gender dimana harapan lama sekolah laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk melanjutkan sekolah 12 tahun ke depan.

III.4 Ketenagakerjaan

Dalam kehidupan bermasyarakat, jenis kelamin masih sering digunakan sebagai persyaratan dalam pembagian kerja. Laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah dan bekerja, sedangkan perempuan memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Selain itu, laki-laki dianggap memiliki fisik yang kuat yang menyebabkan laki-laki memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan kesempatan kerja dibandingkan

perempuan. Namun, di sisi lain banyak juga jenis pekerjaan yang mensyaratkan dilakukan oleh perempuan karena lebih memerlukan ketelatenan dan ketelitian.

Gambar 3.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-laki dan Perempuan Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2020



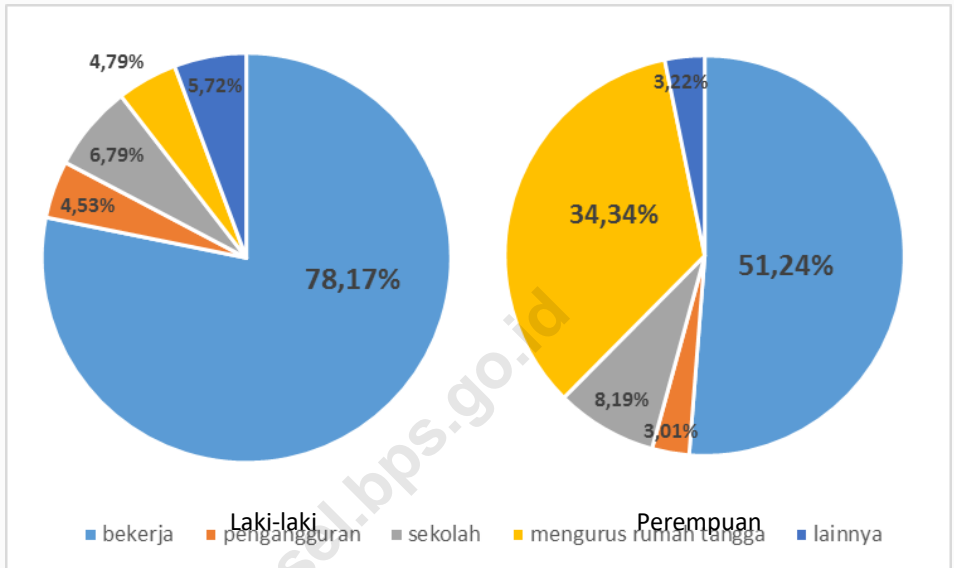
Sumber: Sakernas, BPS

Perbedaan kesempatan kerja tersebut berdampak pada partisipasi tenaga kerja yang tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2020, angka TPAK perempuan hanya sekitar 54,25 persen dan TPAK laki-laki sebesar 82,71 persen (Gambar 3.7). Angka TPAK ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan. Terlihat bahwa

persentase perempuan yang bekerja masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Disparitas TPAK antara laki-laki dan perempuan mencerminkan bahwa kontribusi perempuan dalam dunia kerja masih perlu mendapatkan perhatian.

Rendahnya TPAK perempuan dapat dilihat pada kegiatan seminggu yang lalu. Hal tersebut menunjukkan adanya stigma pembagian peran laki-laki adalah bekerja dan perempuan adalah mengurus rumah tangga. Pada tahun 2020, Selain bekerja, perempuan di Sumatera Selatan melakukan kegiatan lain berupa mengurus rumah tangga dengan proporsi 34,34 persen. Sementara laki-laki yang mengurus rumah tangga hanya sebesar 4,79 persen (Gambar 3.8). Budaya patriarki membuat perempuan menjadi manusia yang cenderung terfokus pada sektor internal keluarga. Sebaliknya, sebagai laki-laki dalam budaya patriarki yang kuat, mereka cenderung terfokus pada sektor eksternal dan bagaimana cara mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga. Hal inilah yang memicu adanya ketimpangan dalam pola pengasuhan anak, sehingga pengasuhan anak sampai saat ini masih identik sebagai tanggung jawab perempuan.

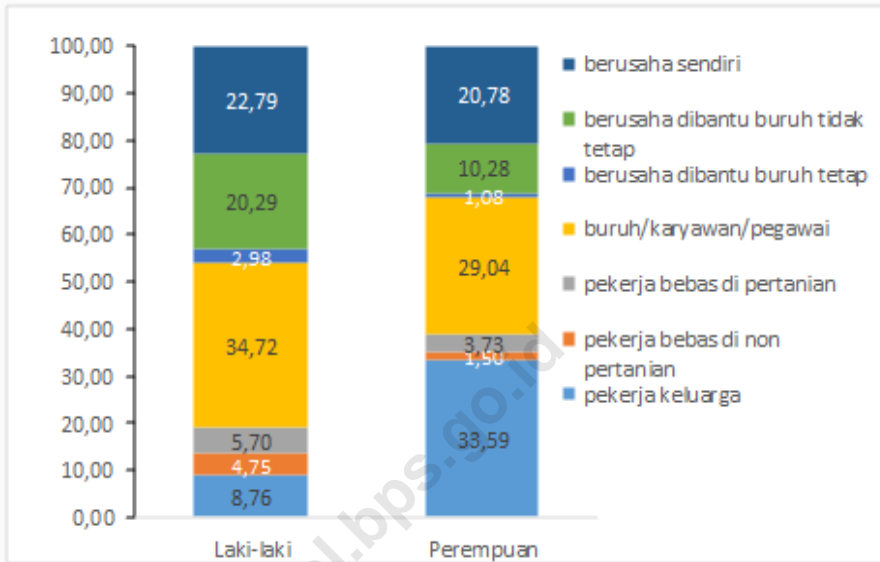
Gambar 3.8 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan, 2020



Sumber : Sakernas Agustus 2020

Adanya kesenjangan juga terlihat dari status pekerjaan utama. Persentase perempuan sebagai pekerja keluarga mencapai hampir 33,59 persen dari semua perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari persentase laki-laki yang hanya 8,76 persen (Gambar 3.9). Hal ini menunjukkan persentase perempuan yang bekerja namun tidak mendapat upah jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Gambar 3.9 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan,, 2020



Sumber : Sakernas Agustus 2020

III.5 Kesempatan dalam Pemerintahan

Untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perempuan harus mewakili aspirasinya pada lembaga legislatif. Dengan duduk pada lembaga legislatif, maka kepentingan perempuan akan mampu diperjuangkan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini menjadi salah satu indikator kesetaraan gender

dalam bidang politik. Dalam Undang-Undang No.8 tahun 2018 mengenai batas minimum keterwakilan perempuan dalam parlemen minimal 30 persen, sepertinya belum terpenuhi. Bahkan pada periode parlemen terakhir 2019-2024, keterwakilan perempuan dalam parlemen mengalami penurunan. Data DPRD Provinsi Sumatera Selatan mencatat bahwa jumlah anggota parlemen perempuan di DPRD pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,67 persen atau terdapat 84 orang perempuan yang menempati kursi DPRD di wilayah Sumatera Selatan, sedangkan tahun 2019 terdapat 90 orang.

Di sisi lain, kontribusi perempuan dalam pemerintahan di Sumatera Selatan adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin tinggi. Pada tahun 2020, persentase PNS di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan. Jumlahnya mendominasi yaitu sebesar 8.268 orang dibandingkan jumlah PNS laki-laki sebesar 6.496 orang.

Peningkatan jumlah PNS perempuan membuktikan kesempatan untuk mendapatkan kesetaraan gender dengan laki-laki semakin tinggi pada sektor Pemerintahan. Keinginan untuk disamakan dan ikut memegang andil dalam pemerintahan tidak hanya menjadi harapan tapi juga sebagai bentuk capaian emansipasi perempuan saat ini.

BAB IV
CAPAIAN PEMBANGUNAN
GENDER
SUMATERA SELATAN

Istilah gender sangat terkait dengan paradigma yang berlaku pada masyarakat, yaitu perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Di sebagian besar dunia memiliki budaya patriaki. Budaya tersebut sering menimbulkan ketidakadilan, terutama kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan, kehidupan bermasyarakat, maupun bernegara. Diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan melalui praktik-praktik nilai-nilai budaya, sosial, dan nilai-nilai kehidupan lainnya tidak dapat dihindari.

Dalam konstitusi, yaitu Pasal 28 I (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum dan filosofis, Negara telah menjamin setiap warga negaranya dari sikap atau tindakan diskriminatif dalam semua hal, termasuk jenis kelamin. Oleh karena itu, untuk menghilangkan ketidakadilan terkait gender, diperlukan adanya kesetaraan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan gender (gender equity) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang.

Sementara keadilan gender (gender equity) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender harus dihilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dengan demikian, perempuan akan memiliki peluang dan kesempatan dalam menggunakan sumber daya dan mempunyai akses untuk mengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya tersebut.

Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu adanya upaya yang dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas 2000-2004) dan dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG). Beberapa undang-undang lain yang mendukung kesetaraan gender antara lain: UU

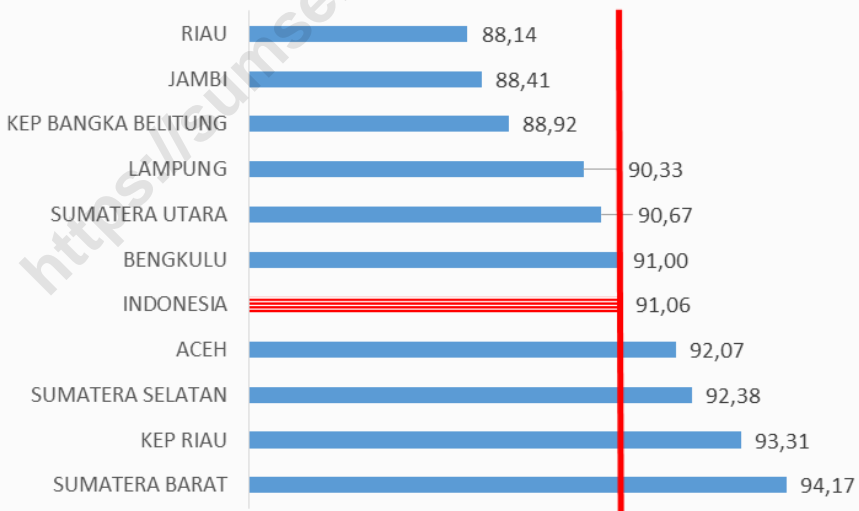
Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvesi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada kesetaraan dan keadilan gender maka perempuan di seluruh Indonesia akan mempunyai peran yang lebih besar dalam pembangunan dan penyelenggaraan Negara. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur, salah satunya adalah dengan IPG (Indeks Pembangunan Gender). Pertama kali IPG diperkenalkan oleh United Nations Development (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia tahun 1995. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Dari angka IPG diharapkan mampu memberikan perkembangan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan gender. Secara umum, pembangunan manusia secara kuantitatif telah digambarkan dari angka IPM. Akan tetapi indikator tersebut tidak menjelaskan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IV.1 IPG Provinsi di Pulau Sumatera

Dengan berbagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender, masing-masing provinsi di Indonesia melakukan langkah konkret untuk menghilangkan diskriminasi terkait gender. Hal tersebut terlihat dari capaian IPG pada masing-masing provinsi khususnya di Pulau Sumatera. Berdasarkan angka IPG nasional 2020 sebesar 91,06. Sumatera Selatan berada di atas angka nasional dengan angka IPG sebesar 92,38.

Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Gender Indonesia dan Provinsi di Pulau Sumatera, 2020



Sumber: BPS, Susenas 2020

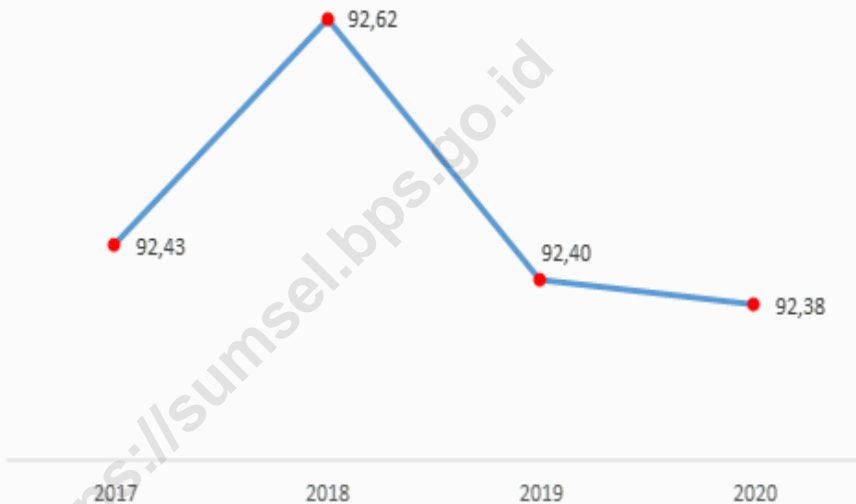
Di dalam lingkup Pulau Sumatera, masih ada provinsi yang capaian IPG di bawah angka IPG nasional. Hal tersebut tercermin dari capaian angka IPG provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Provinsi di Pulau Sumatera dengan angka IPG tertinggi adalah Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Ketiga provinsi tersebut telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan pada berbagai hal. Ketiga provinsi tersebut telah berhasil mengimplikasikan peran perempuan yang lebih besar, baik dalam bidang ekonomi dan non-ekonomi.

IV.2 IPG Sumatera Selatan

Nilai IPG Sumatera Selatan sudah cukup tinggi dengan berbagai upaya yang telah ditempuh pemerintah termasuk dengan melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui peraturan undang-undang yang berkeadilan gender. Pembahasan mengenai kesetaraan gender menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi sebuah wilayah. Capaian pembangunan akan terlihat dari peningkatan indikator-indikator pembangunan yang berkaitan dengan gender.

Dalam kurun waktu 4 tahun, pencapaian pembangunan gender di Sumatera Selatan menunjukkan adanya fluktuasi setiap tahunnya (Gambar 4.2). Peningkatan IPG di tahun 2018 dikarenakan adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak.

Gambar 4.2 Perkembangan IPG Sumatera Selatan 2017-2020



Sumber: BPS, Susenas 2020

Penurunan IPG sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 tentunya menjadi perhatian khususnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di lingkungan Sumatera Selatan. Dari tiga dimensi, masih terdapat ketimpangan capaian penduduk laki-laki

dan perempuan yaitu pada dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan juga dimensi ekonomi..

IV.3 Komponen IPG Sumatera Selatan

IPG merupakan rasio IPM perempuan dan laki-laki, dimana komponen pembentuk IPM laki-laki dan perempuan sama dengan komponen pembentuk IPM. Komponen pembentuk tersebut yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin.

Tabel 4.1 Rasio dan Nilai Komponen IPG Sumatera Selatan, 2020

Komponen		Sumatera Selatan	
		Nilai	Rasio P/L
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (tahun)	Laki-laki	68,00	1,06
	Perempuan	71,86	
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Laki-laki	8,57	0,92
	Perempuan	7,90	
Harapan Lama Sekolah (tahun)	Laki-laki	12,40	1,02
	Perempuan	12,62	
Pengeluaran Perkapita Pertahun (US\$)	Laki-laki	14748	0,63
	Perempuan	9289	
IPG		92,38	

Sumber: BPS, Susenas 2020

Kesehatan adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yang tercermin dari kondisi fisik yang senantiasa sehat. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai langkah telah diupayakan oleh pemerintah salah satunya melalui pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, leluasa, dan murah. Angka Harapan Hidup di suatu negara merupakan elemen kunci yang sering dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan kesehatan.

Definisi dari Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Dari tabel 4.1 secara umum AHH perempuan (P) lebih tinggi dibandingkan AHH laki-laki (L) pada tahun 2020 dengan Rasio P/L sebesar 1,06. AHH perempuan mencapai 71,86 tahun sedangkan AHH laki-laki mencapai 68,00 tahun. Perbedaan level atau gap yang terjadi pada angka harapan hidup perempuan dan laki-laki sebenarnya tidak hanya terjadi di Sumatera Selatan atau di Indonesia saja.

Rata-rata negara-negara di dunia juga pernah atau sedang mengalami fase demikian. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut.

Secara genetis, perempuan dibekali dengan sepasang kromosom X, sedangkan laki-laki dibekali kromosom X dan Y. Kromosom X mengandung 1100 gen, yang tidak hanya mengambil peran penting dalam pengaturan hormon, tetapi juga pada fungsi vital tubuh lainnya, seperti pembekuan darah, metabolisme dan perkembangan janin. Sementara, kromosom Y mempunyai kurang dari 100 gen, dimana fungsi utamanya hanya untuk pembentukan dan perkembangan testis dan hormonalnya. Dengan demikian, jika terjadi infeksi penyakit, secara biologis perempuan lebih mampu bertahan dibandingkan laki-laki, terutama pada masa pertama tahun kehidupan.

Pendidikan yang berkualitas merupakan modal dasar pembangunan yang menentukan arah perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Menurut Boserup (1984), pendidikan mampu membangun pola pikir seseorang menjadi lebih peka dan kritis dalam menanggapi suatu permasalahan, serta membuka pengetahuan seseorang yang memungkinkan untuk mengubah nasib seseorang. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Sumatera Selatan. Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi

pengetahuan baik dalam IPM maupun IPG adalah Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*). *EYS* menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah merepresentasikan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal. *EYS* dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa *EYS* perempuan masih lebih tinggi dari *EYS* laki-laki, namun perbedaannya tidak terlalu signifikan, dimana Rasio P/L sebesar 1,02. *EYS* perempuan mencapai 12,62 tahun sedangkan *EYS* laki-laki mencapai 12,40 tahun. Hal tersebut menunjukkan hampir tidak ada ketimpangan dalam hal harapan lama sekolah atau dapat dikatakan hampir setaranya harapan lama sekolah bagi perempuan dengan laki-laki di Sumatera Selatan.

Sedangkan untuk *MYS*, dibutuhkan jangka waktu yang cukup lama untuk menjadikan indikator tersebut meningkat secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan perubahan *MYS* ataupun *EYS* membutuhkan proses yang kompleks, tidak serta merta meningkat seiring pembangunan gedung sekolah atau fasilitas sekolah, akan

tetapi juga harus diiringi dengan penyediaan tenaga pendidik yang cukup serta berkualitas, dan lebih utamanya faktor budaya yang menomorduakan pendidikan harus diubah. MYS perempuan mencapai 7,90 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP sedangkan MYS laki-laki mencapai 8,57 tahun atau setara kelas 2 SMP.

Secara umum, perbedaan capaian rata-rata lama sekolah antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kecenderungan yang tetap. Hal ini dikarenakan MYS merupakan indikator yang lambat peningkatannya dan sangat dipengaruhi oleh angka harapan lama sekolah dalam jangka panjang. Hal ini juga menjadi masukan bagi pemerintah untuk lebih mengupayakan peningkatan pembangunan pendidikan masyarakat khususnya bagi perempuan.

Pada tabel 4.1 menyajikan pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2020 pengeluaran perempuan sebesar 9,289 juta rupiah, dan pengeluaran laki-laki mencapai 14,748 juta rupiah per tahun. Data sakernas BPS menunjukkan bahwa proporsi yang bekerja laki-laki di Sumatera Selatan pada tahun 2020 sekitar 78,17 persen sedangkan proporsi perempuan bekerja hanya sebesar 51,24 persen. Artinya, penduduk laki-laki masih mendominasi angkatan kerja di Sumatera Selatan khususnya

yang bekerja. Hal ini berpengaruh pada sumbangan pendapatan perempuan yang lebih kecil. Jika partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan meningkat, proporsi sumbangan pendapatan perempuan akan meningkat pula. Pada akhirnya akan mempersempit gap dengan proporsi sumbangan pendapatan laki-laki dan perempuan.

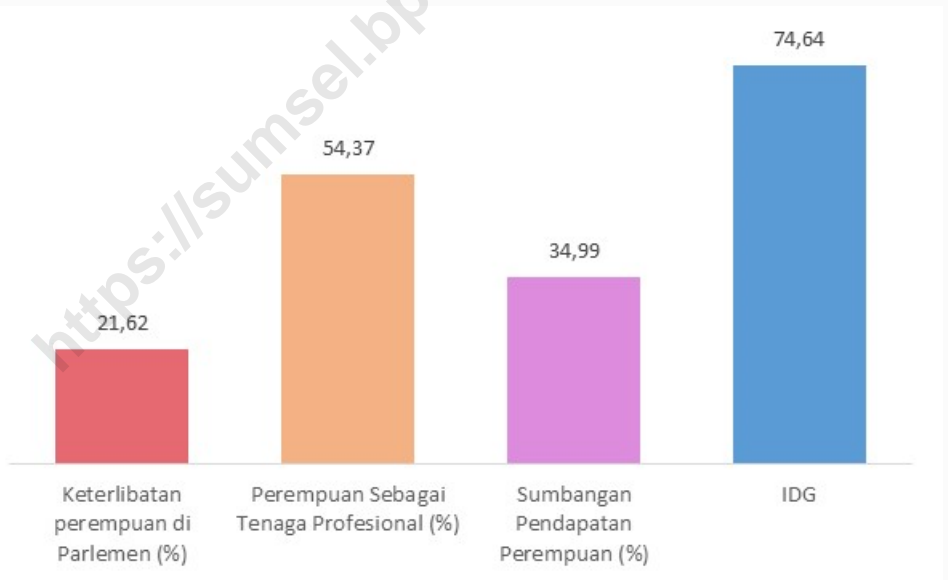
Dari tiga dimensi yang sudah dibahas sebelumnya, ternyata masih terdapat ketimpangan pada dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan juga dimensi ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah baik di Provinsi dan Daerah harus mampu menyusun program pembangunan yang lebih responsive terhadap gender, mengingat pemerintah menargetkan kesetaraan gender bisa terwujud paling lama ditahun 2025 mendatang. Hal tersebut ditujukan agar perempuan juga perempuan juga mampu secara optimal menikmati perannya sebagai subyek sekaligus objek pembangunan.

Peningkatan IPG hingga mencapai 92,38 di tahun 2020 juga menunjukkan bahwa target RPJMD 2015-2019 terkait dengan peningkatan IPG secara kontinu sejauh ini masih dapat tercapai. Harapannya, kedepan prestasi ini dapat terus dipertahankan sehingga peran perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial terus meningkat.

IV.4 Pencapaian Komponen IDG di Sumatera Selatan

Meskipun berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender, namun secara umum capaian komponen IDG pada tahun 2020 untuk perempuan masih lebih rendah laki-laki seperti yang disajikan pada gambar 4.2. Hal ini terjadi di semua komponen pembentuk IDG, baik dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan, maupun dalam perekonomian.

Gambar 4.3 Pencapaian Komponen IDG di Sumatera Selatan, 2020



Sumber: BPS, 2020

Masih relatif rendahnya capaian perempuan jika dibandingkan laki-laki bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan yang kedua, walaupun pembangunan manusia telah memberikan kesempatan kepada semua penduduk tanpa terkecuali, tetapi kesempatan ini tidak digunakan secara optimal oleh kelompok lain (dalam hal ini perempuan), sehingga terkesan bahwa perempuan selalu termarginalkan. Untuk melihat sejauh mana perbedaan capaian antara perempuan dengan laki-laki setiap komponen pembentuk IDG, akan dibahas dalam uraian berikut ini.

IV.4.1 Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Sebagaimana tercantum dalam agenda pembangunan RPJMD 2014-2019 dalam hal membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan termasuk dalam proses pengambil keputusan di lembaga eksekutis, legislatif dan yudikatif. Sasaran tersebut juga sebetulnya telah termaktup dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekurang-kurangnya 30 persen.

Gambar 4.4 Pencapaian Komponen IDG di Sumatera Selatan, Periode 2018-2020



Sumber: BPS

Namun, kuota ini belum tercapai secara optimal, artinya pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal. Keterwakilan perempuan dalam parlemen hanya sebesar 21,33 persen. Angka tersebut belum sesuai dengan kuota yang tersedia. Adanya kecenderungan meningkat dalam berkontribusi meskipun belum mencapai kuota sesuai UU namun keterwakilan keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Apabila kuota perempuan yang telah diatur dalam UU tersebut mampu dicapai secara optimal, tentu akan membawa dampak yang positif dalam pemberdayaan

perempuan, mengingat kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isu-isu gender.

IV.4.2 Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi

Dahulu perempuan hanya dipandang sebagai makhluk yang hanya berurusan dengan pekerjaan rumah tangga. Padahal perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki, hanya perempuan kurang memiliki kesempatan karena terbentur oleh persoalan budaya serta kodrat yang melekat terkait dengan produksi-produksi reproduksi. Sayangnya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta, dan organisasi sosial lainnya sangat kecil, mengingat masih terbatasnya perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan/managerial, administrasi, serta teknisi.

Salah satu komponen pengukuran IDG adalah persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, kepemimpinan dan teknisi. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan perempuan di posisi ini memberikan gambaran kemajuan peran perempuan.

Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih lebih besar dibandingkan komponen keterwakilan perempuan di parlemen. Capaian pada tahun 2020 sebesar 53,37 persen sementara tahun 2018 mencapai 53,66 persen. Meningkatnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam perekonomian mulai dioptimalkan agar bisa disejajarkan dengan laki-laki.

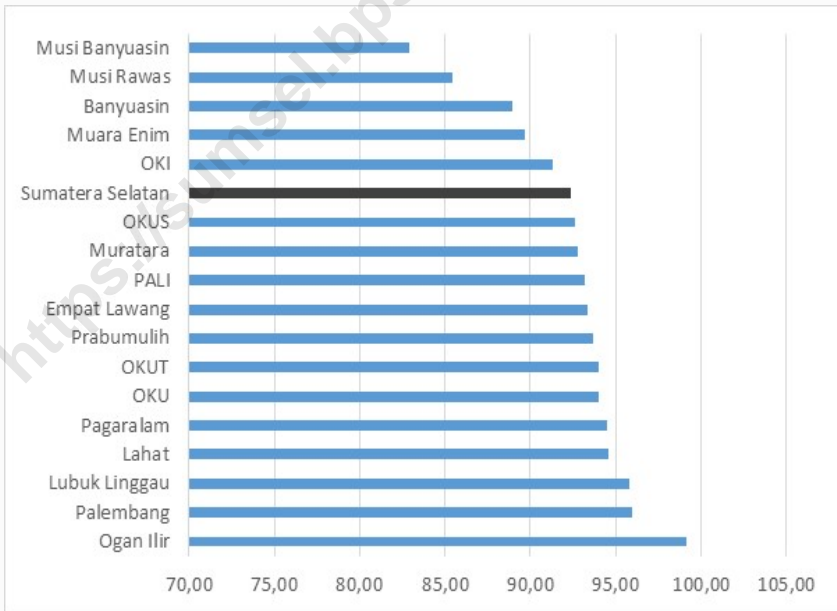
Peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang masih relatif kecil memerlukan upaya lebih serius dari berbagai pihak terutama penentu kebijakan dalam rangka mendorong agar perempuan lebih maju dalam mencapai kapabilitas yang optimum sehingga dapat berpeluang menduduki jabatan-jabatan strategis. Dengan catatan bahwa variabel kompetensi dan profesionalisme tetap dipertimbangkan dalam pemilihan perempuan dalam menduduki posisi strategis tersebut.

IV.5 Disparitas Capaian IPG Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Kesenjangan pembangunan antar wilayah masih menjadi tantangan pembangunan di Sumatera Selatan di mana terdapat berbagai karakteristik yang khas di setiap daerah. Wilayah perkotaan cenderung mengalami pembangunan yang lebih

pesat dibandingkan wilayah perdesaan. Keteringgalan pembangunan di wilayah perdesaan menyebabkan terjadinya kesenjangan capaian pembangunan di berbagai bidang kehidupan antar wilayah. Kesenjangan pemberdayaan gender antar wilayah masih menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Dengan demikian, perlu upaya peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan di tingkat daerah.

Gambar 4.5 Pencapaian IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020



Sumber : BPS, 2020

Tabel 4.2 IDG dan Komponen IDG Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2020

Kabupaten/Kota	IDG	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Parlemen	Sumbangan Pendapatan Perempuan
OKU	50,05	5,71	58,10	24,87
OKI	59,89	15,56	60,17	25,29
MUARA ENIM	69,65	15,56	53,23	36,90
LAHAT	67,40	15,00	61,63	37,44
MUSI RAWAS	58,46	12,50	53,78	25,93
MUSI BANYUASIN	59,84	6,67	47,11	35,21
BANYUASIN	60,49	11,11	52,74	29,52
OKU SELATAN	54,56	10,00	56,53	23,68
OKU TIMUR	58,96	8,89	56,15	30,00
OGAN ILIR	60,21	15,00	62,23	28,23
EMPAT LAWANG	55,87	8,57	67,77	34,62
PALI	49,90	0,00	60,27	37,44
MURATARA	48,68	4,00	52,71	26,25
PALEMBANG	58,27	8,00	50,62	29,91
PRABUMULIH	59,80	16,00	57,70	24,85
PAGAR ALAM	55,06	16,00	65,02	22,01
LUBUKLINGGAU	59,79	13,30	53,06	27,30
SUMATERA SELATAN	74,64	21,62	54,37	34,99

Sumber: BPS, Susenas 2020

Kabupaten Ogan Ilir merupakan Kabupaten dengan nilai IPG Kabupaten Tertinggi di Sumatera Selatan tahun 2020 dengan nilai 99,13 (di atas IPG Sumatera Selatan dan nasional). Di dalam wilayah Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin berada posisi yang paling rendah yang tercermin dari posisi angka IPG sebesar 82,90.

Apabila diukur dari partisipasi perempuan pada berbagai hal, Kabupaten Muara Enim berada pada posisi tertinggi dimana Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 69,65 dimana terdiri dari komponen keterlibatan perempuan di parlemen sudah mencapai 20 persen (tertinggi di Sumatera Selatan), perempuan sebagai tenaga profesional mencakup kurang dari separuh perempuan bekerja di Kabupaten Muara Enim namun baru 36,90 persen pendapatan berasal dari kontribusi perempuan yang bekerja.

IV.6 Hubungan antara IPM dengan IPG

Rendahnya kualitas sumber daya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil

dan sejahtera secara umum. Kemajuan perempuan dan kesetaraan gender tidak dapat dilihat hanya sebagai isu perempuan saja. Namun sebagai prasyarat untuk mencapai keamanan politik, sosial, ekonomi, budaya dan semua aspek dalam kehidupan masyarakat secara umum.

Kini, peran dan posisi antara perempuan dan laki-laki mulai disetarakan dalam berbagai hal. Karena makna pembangunan itu sendiri adalah perluasan pilihan termasuk bagi kaum perempuan. Perluasan pilihan mencakup dalam bidang sosial-ekonomi bagi individu perempuan itu sendiri maupun bagi masyarakat umumnya.

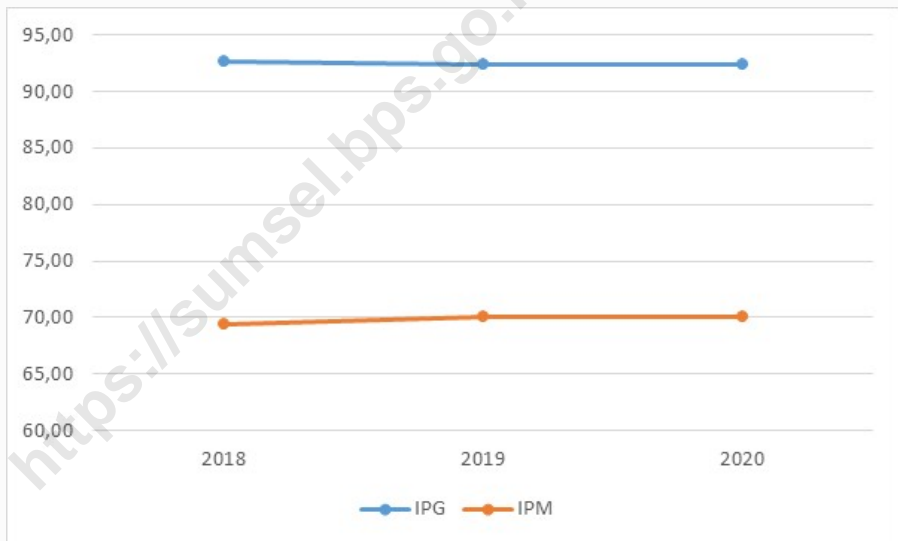
Indikator pembangunan gender merupakan sebuah alat evaluasi dalam pencapaian pembangunan berbasis gender. Dan diantara banyak indikator pembangunan yang sering digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

IPM secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia yang diukur dari tiga dimensi atau komponen: pembangunan ekonomi (diukur dengan pendapatan per kapita dan didekati dengan pengeluaran per kapita), pembangunan kesehatan (diukur dengan angka harapan hidup) dan pembangunan pendidikan (diukur dengan rata-

rata lama sekolah dan harapan lama sekolah). IPM yang lebih tinggi menunjukkan capaian pembangunan yang lebih baik.

IPM menurut jenis kelamin sangat penting dihitung untuk melihat pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki inilah yang menjadi fokus dalam IPG. Sehingga IPG menunjukkan capaian pembangunan manusia yang telah memasukkan aspek disparitas gender.

Gambar 4.6 Trend IPM dan IPG Sumatera Selatan 2020



Sumber: BPS, Susenas 2020

Disparitas gender masih terjadi di dalam proses pembangunan manusia. Namun, tren pembangunan gender terlihat semakin membaik. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar 4.6

yang memperlihatkan bahwa selama periode 2018-2020, nilai IPG Sumatera Selatan terus meningkat seiring dengan peningkatan IPM. Artinya peningkatan pembangunan manusia secara umum dapat dibarengi dengan kondisi kesetaraan pembangunan gender secara utuh.

Namun perbandingan tren IPM dan IPG pada Grafik 4.6 tersebut juga menunjukkan perbedaan percepatan IPM dan IPG. Pertumbuhan IPM terlihat sedikit lebih cepat dibandingkan IPG. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan capaian pembangunan perempuan lebih rendah dibandingkan peningkatan capaian pembangunan laki-laki.

BAB V

KESIMPULAN

<https://sumsel.bps.go.id>

- ◆ Dari sisi pendidikan, perempuan Sumatera Selatan telah mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang, yang tercermin dari persentase yang menerima ijazah akhir, rasio EYS dan MYS. Namun jika dilihat dari rata-rata lama sekolah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan.
- ◆ Kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekurang-kurangnya 30 persen. Namun, tahun 2020 partisipasi perempuan dalam politik masih rendah.
- ◆ Tingkat keberhasilan capaian pembangunan berbasis persoalan gender salah satunya diukur IPG (Indeks Pembangunan Gender). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status perempuan, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar.
- ◆ Capaian angka IPG Sumatera Selatan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun pada periode 2019-2020 angka IPG dan IPM Sumatera Selatan mengalami penurunan
- ◆ Kesetaraan gender ditandai dengan angka IPG yang di atas 100. Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau adalah daerah yang konsisten dengan IPG dan IPM yang tinggi.

<https://sumsel.bps.go.id>

Lampiran

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Beserta
Komponen, 2020

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran (ribu Rupiah)		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Sumatera Selatan	68,00	71,86	12,40	12,62	8,57	7,90	14 748	9 289	92,38
OKU	65,98	70,15	12,13	12,82	8,92	8,38	14 793	9 711	94,00
OKI	66,41	70,57	11,39	11,74	7,46	6,55	15 968	9 280	91,30
Muara Enim	67,25	70,86	11,76	12,14	8,24	7,39	15 907	8 281	89,64
Lahat	64,01	67,95	12,22	12,98	8,89	8,11	13 156	9 490	94,60
Musi Rawas	66,05	70,10	12,03	12,11	7,83	7,13	14 834	5 944	85,45
Musi Banyua- sin	66,58	70,71	11,99	12,08	7,89	7,34	15 810	5 197	82,90
Banyuasin	66,80	70,92	11,65	11,96	7,64	6,88	14 552	7 216	88,93
OKUS	64,98	68,97	11,50	12,13	7,98	7,76	12 180	7 360	92,62
OKUT	67,04	71,05	12,17	12,35	8,05	7,10	15 238	11 198	94,00
Ogan Ilir	63,46	67,38	12,26	12,54	8,17	7,64	10 424	10 772	99,13
Empat Lawang	63,09	66,97	11,81	12,51	8,11	7,45	13 285	8 757	93,38
PALI	66,09	70,23	11,05	12,05	7,56	6,54	11 532	7 670	93,17
Murata	63,66	67,57	11,41	12,34	7,47	6,38	14 127	9 135	92,82
Palembang	68,74	72,71	14,45	14,27	10,83	10,03	16 887	14 308	95,97
Prabumulih	68,27	72,24	12,75	13,19	10,18	9,73	18 813	11 882	93,70
Pagar Alam	64,67	68,64	12,85	13,28	9,53	9,24	11 645	8 243	94,46
Lubuklinggau	67,14	71,19	13,30	14,12	10,26	9,64	17 296	12 816	95,83

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten Anwar Sastro No.1131 Palembang 30129
Telp.(0711 351665, 353174, Fax (0711) 353174

ISBN 978-602-6925-54-1

